Pembelajaran Kebijakan Internasional untuk Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah

Analisis Legislatif Ahli Madya

Yulia Indahri, S.Pd., M.A.
Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.
Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Analisis Legislatif Ahli Muda

Fieka Nurul Arifa, M.Pd.
Nur Sholikhah Putri Suni, M.Epid.

Ringkasan

Kajian ini membandingkan program makan bergizi gratis di Amerika Serikat, Jepang, dan Brasil, untuk merumuskan pelajaran yang relevan bagi Indonesia. Amerika Serikat menjalankan *National School Lunch Program* dengan dana federal yang menyediakan makan siang bergizi untuk siswa, Jepang mengintegrasikan pendidikan gizi melalui program *Shokuiku* dan *Kyūshoku* yang menekankan bahan lokal, sementara Brasil menggabungkan nutrisi sekolah dengan dukungan pertanian lokal melalui *Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*. Berdasarkan praktik terbaik dan pelajaran dari ketiga negara tersebut, Indonesia dapat mengadopsi elemen-elemen dari ketiga negara untuk mengembangkan program makan bergizi sekolah yang meningkatkan kesehatan siswa, mendukung ekonomi lokal, dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masalah kesehatan global, seperti obesitas dan malnutrisi pada anak-anak, menjadi perhatian utama di banyak negara. Kondisi ini diperparah oleh peningkatan obesitas yang sering disertai dengan kekurangan gizi, sehingga menekankan pentingnya kebijakan pendidikan gizi yang efektif. Kebiasaan makan yang buruk pada masa kanak-kanak dapat berdampak negatif pada kesehatan hingga dewasa dan memicu berbagai masalah kesehatan kronis (School Nutrition Association, 2024). Program pendidikan gizi yang baik dapat membekali anak-anak dengan pengetahuan dan keterampilan untuk memilih makanan sehat, membantu mencegah obesitas dan malnutrisi, serta menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung kebiasaan makan yang sehat (Sidaner *et al.*, 2013).

Beberapa negara telah mengimplementasikan program makan bergizi di sekolah, seperti *National School Lunch Program* (NSLP) di Amerika Serikat. NSLP menyediakan makanan bergizi setiap hari bagi siswa dengan fokus pada peningkatan kualitas gizi dan pengurangan obesitas (Constantine & Santarelli, 2017). Di Jepang, program *Shokuiku* membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini, dengan penekanan pada keseimbangan gizi dan pelestarian budaya makanan. Sementara itu, *Programa Nacional de Alimentação Escolar* (PNAE) di Brasil menggabungkan pendidikan gizi dengan dukungan terhadap pertanian lokal, untuk memastikan makanan bergizi dan memperkuat ekonomi lokal (Sidaner *et al.*, 2013).

Program makanan bergizi di sekolah diakui dalam *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (1966) dan *Convention on the Rights of the Child* (1989) sebagai bagian dari hak anak atas makanan sehat, yang penting untuk pertumbuhan, perkembangan kognitif, dan prestasi akademik (FAO, 2020). Menurut World Health Organization (2020), gizi yang baik sangat penting dalam perkembangan fisik dan kognitif anak, serta dalam pencegahan penyakit kronis. Program-program ini juga membantu membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini dan berdampak positif pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan (Drake *et al.*, 2016; Santos *et al.*, 2022).

Keberhasilan program ini tercermin dalam peningkatan performa akademik dan kesehatan anak-anak (Phillips, 2024). Selain meningkatkan kehadiran siswa di sekolah, program ini juga memperbaiki kondisi nutrisi secara keseluruhan, meningkatkan kesehatan dan kesuksesan akademik, serta mendukung ekonomi lokal dengan meningkatkan permintaan produk pangan lokal dan memberikan dukungan bagi petani kecil (FAO, 2020; Pye-Smith, 2014; Santos *et al.*, 2022). Keterlibatan sektor swasta, kerja sama dengan petani lokal, dan dukungan organisasi internasional turut memastikan keberlanjutan program ini (Drake *et al.*, 2016; GCNF, 2021).

Sejak awal abad ke-20, program makanan bergizi telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesehatan dan kinerja akademik anak-anak. Program ini juga

berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal, stabilitas sosial, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), seperti memerangi kemiskinan, mengakhiri kelaparan, memperbaiki status gizi anak, memastikan pendidikan berkualitas, memperkuat ketahanan pangan, dan mendukung pemulihan sosial-ekonomi global (FAO, 2020). Oleh karena itu, program makanan bergizi di sekolah harus menjadi prioritas kebijakan pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran dan infrastruktur di beberapa wilayah masih memerlukan solusi strategis untuk memastikan keberlanjutan program ini (MEXT, 2013; Santos, 2022; WFP, 2023).

Bagi Indonesia, program makanan bergizi di sekolah sangat relevan untuk menjawab tantangan kesehatan dan pendidikan anak. Dengan mempelajari pengalaman dari Amerika Serikat, Jepang, dan Brasil, Indonesia dapat mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal, termasuk *political will* untuk periode 2024–2029. Program yang diimplementasikan dengan baik akan memberikan kontribusi signifikan terhadap kesehatan dan pendidikan anak-anak, mendukung keberlanjutan ekonomi dan sosial, serta mengurangi ketimpangan pendidikan (Food and Nutrition Service, 2024; JapanGov, 2021; Sidaner *et al.*, 2013).

Fokus Permasalahan

Banyak negara menghadapi tantangan dalam merancang kebijakan makan dan pendidikan gizi di sekolah yang berkelanjutan, terutama karena perbedaan konteks ekonomi, sosial, budaya, dan geografis. Meskipun pendekatannya berbeda, inisiatif yang diterapkan di setiap negara telah terbukti efektif dalam mengatasi isu kesehatan dan pendidikan anak. Analisis ini difokuskan pada bagaimana penerapan program makan bergizi gratis dapat berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan alokasi anggaran di Indonesia. Dengan mempelajari keberhasilan serta tantangan yang dihadapi oleh Amerika Serikat, Jepang, dan Brasil, Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik yang sesuai dengan kondisi lokal dan sistem hukum nasional untuk secara berkelanjutan memperbaiki status gizi anak-anak.

Tujuan

Analisis ini bertujuan mengidentifikasi dampak program makanan bergizi di Amerika Serikat, Jepang, dan Brasil terhadap kesehatan, pendidikan, dan anggaran. Dengan memanfaatkan praktik terbaik dari ketiga negara, Indonesia dapat mengembangkan kebijakan makanan bergizi sekolah yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang. Analisis ini juga mengeksplorasi potensi adopsi dan merumuskan opsi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan serta sistem hukum Indonesia. Hasilnya diharapkan menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi untuk mengatasi masalah gizi anak dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Negara dan Alasan Pemilihan Negara

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak di Indonesia, analisis legislasi asing mengenai program makan bergizi di sekolah sangat penting untuk memahami model yang efektif dan berkelanjutan. Amerika Serikat, Jepang, dan Brasil dipilih sebagai subjek studi karena ketiga negara ini telah mengimplementasikan program makan bergizi nasional yang berpengaruh dalam membentuk organisasi makanan sekolah di seluruh dunia (Gaddis & Robert, 2024). Masing-masing negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani tantangan pendidikan gizi dan program makanan sekolah, didukung oleh kerangka hukum yang kuat (Cruz, 2020; IPU and FAO, 2021). Program-program ini telah berhasil menyediakan asupan gizi yang memadai, mendukung pendidikan, serta meningkatkan kesehatan anak-anak secara berkelanjutan (Food and Nutrition Service, 2024; JapanGov, 2021; Sidaner *et al.*, 2013).

B. PERBANDINGAN PENGATURAN

Amerika Serikat

Amerika Serikat memiliki sejarah panjang dalam program gizi federal, dimulai dengan NSLP yang diluncurkan pada 1946 sebagai respons terhadap krisis ekonomi nasional 1930-an. Pada 1946, Kongres menyetujui *National School Lunch Act* yang menciptakan NSLP untuk menyediakan makan siang bergizi gratis atau bersubsidi bagi anak-anak memenuhi $\frac{1}{3}$ sampai $\frac{1}{2}$ dari kebutuhan gizi harian anak, melayani hampir 30,4 juta anak di 101.000 sekolah dan lembaga penitipan anak, yang diatur oleh Food and Nutrition Service (FNS) dari United States Department of Agriculture (USDA) (Cheng *et al.*, 2020; Zulfikar, 2024).

Makanan yang disajikan bervariasi tergantung pada pendapatan keluarga siswa, yaitu makan siang gratis untuk pendapatan di bawah \$27.000, bersubsidi \$0,40 per makan untuk pendapatan hingga \$39.000, dan tarif penuh untuk berpendapatan lebih tinggi (Baskin, 2024). Makanan ini harus memenuhi standar gizi federal, termasuk susu rendah atau tanpa lemak, biji-bijian utuh, buah-buahan, dan sayuran (Guthrie, 2021; Izumi *et al.*, 2018).

Pada 2010, Kongres mengesahkan *Healthy, Hunger-Free Kids Act* untuk mengatasi kelaparan dan obesitas pada anak, mengurangi kesenjangan kualitas makanan di sekolah, dan mengharuskan USDA menyelaraskan pola makan dan standar gizi NSLP dengan pedoman diet nasional (USDA, 2010). Perubahan ini meningkatkan ketersediaan buah, sayur, biji-bijian utuh, dan susu rendah atau bebas lemak, serta memenuhi kebutuhan kalori dan mengurangi natrium sesuai kelompok usia (Izumi *et al.*, 2018). USDA memperbarui pola makan dan standar gizi untuk NSLP, dengan merevisi takaran penyajian untuk mendorong konsumsi lebih banyak buah dan sayur. Sekolah kini harus menggunakan sistem perencanaan menu berbasis lima komponen utama, yaitu buah, sayur, biji-bijian, daging atau alternatifnya, dan susu. Siswa harus mengonsumsi minimal 3 dari 5 komponen yang ditawarkan, dengan salah satu komponen berupa $\frac{1}{2}$ cangkir

(*cups*) buah atau sayur, dengan semua biji-bijian harus utuh dan susu bebas lemak atau rendah lemak 1% (Izumi *et al.*, 2018). Tabel 1 memperlihatkan pola makan dan standar gizi sebelum dan sesudah diberlakukan *Healthy, Hunger-Free Kids Act of 2010*.

Tabel 1

Pola Makan dan Standar Gizi berdasarkan Kelompok Usia Sebelum dan Sesudah *Healthy, Hunger-Free Kids Act of 2010*

Pola Makan	Sebelum	Sesudah		
		Usia 5 tahun	Usia 6–8 tahun	Usia 9–12 tahun
Buah (<i>cups</i>)	½–¾ buah atau sayur x sehari	½ x sehari,	½ x sehari, 2½ x seminggu	1 x sehari, 5 x seminggu
Sayur (<i>cups</i>)	2½ x seminggu	¾ x sehari, 3¾ x seminggu	¾ x sehari, 3¾ x seminggu	1 x sehari, 5 x seminggu
Biji-bijian	> 1 x sehari, 8 x seminggu	1 x sehari, 8–9 x seminggu	1 x sehari, 8–10 x seminggu	1 x sehari, 10–12 x seminggu
Daging atau alternatif daging	1,5–2 x sehari	1 x sehari, 8–9 x seminggu	1 x sehari, 8–9 x seminggu	1 x sehari, 8–9 x seminggu
Susu (<i>cups</i>)	1 x sehari	1 x sehari, 5 x seminggu	1 x sehari, 5 x seminggu	1 x sehari, 5 x seminggu
Kalori (kcal)	Usia 6 tahun = minimal 664 Usia 7–12 tahun = minimal 825	550–650	600–700	5 x seminggu
Lemak, % total kalori	<10	<10	<10	<10
Sodium (mg)	Tidak ada standar	< 1.230	< 1.360	< 1.420
Lemak trans (g)	0	0	0	0

Sumber: Izumi *et al.*, 2018

FNS di bawah USDA mengelola NSLP di tingkat federal, sementara pengawasan di tingkat negara bagian dilakukan oleh badan terkait, biasanya Departemen Pendidikan. Pejabat negara bagian bekerja sama dengan sekolah di wilayahnya untuk memastikan staf kantin memiliki informasi dan peralatan yang diperlukan. Sekolah yang berpartisipasi dalam NSLP harus mematuhi pedoman tertentu dan menerima subsidi federal untuk setiap makanan yang disajikan. Program ini terintegrasi dengan program lain, seperti program buah dan sayuran segar dari Departemen Pertahanan, program bantuan sementara untuk keluarga miskin, dan program bantuan gizi tambahan.

Sekolah harus memenuhi standar gizi federal dan menyediakan sarapan gratis atau bersubsidi bagi siswa yang memenuhi syarat. USDA memberikan pelatihan teknis dan dukungan kepada staf sekolah menyajikan makanan sehat, serta edukasi gizi kepada

siswa agar memahami hubungan antara pola makan dan kesehatan. Makanan gratis atau bersubsidi terbukti meningkatkan ketahanan pangan keluarga, memperbaiki kesehatan anak, dan memperluas peluang pendidikan siswa (Bartfeld & Ahn, 2011). Penelitian juga menunjukkan bahwa program ini berdampak positif pada peningkatan disiplin siswa di sekolah, terutama di daerah dengan tingkat kerawanan pangan yang tinggi (Gordon & Ruffini, 2018).

Selain NSLP, *School Breakfast Program* (SBP) dimulai sebagai percontohan pada 1966 dan menjadi permanen sejak 1975, menyediakan sarapan bergizi setiap hari kepada jutaan siswa, terutama dari keluarga kurang mampu dan sekolah berkebutuhan khusus. Fokus utamanya adalah meningkatkan gizi anak dari keluarga berpenghasilan rendah dan ibu yang bekerja. Kedua program ini sangat penting dalam meningkatkan kesehatan anak, mendukung hasil pendidikan, mendukung stabilitas ekonomi keluarga, mengurangi pengeluaran pangan, dan memperkuat ketahanan pangan dengan menyediakan makanan bergizi secara bersubsidi atau gratis, tergantung pada kondisi keuangan keluarga (Bartfeld & Ahn, 2011; Jones & Toossi, 2024).

NSLP dan SBP berfungsi sebagai model program makan berskala besar yang didanai melalui kombinasi anggaran federal dan negara bagian, serta diterapkan di berbagai wilayah (Food and Nutrition Service, 2024). Pada tahun fiskal 2020, NSLP menerima dana sebesar \$13,9 miliar, sementara SBP mendapatkan \$4,5 miliar (Food and Nutrition Service, 2021). Sekolah yang berpartisipasi menerima subsidi tunai dari USDA sesuai status ekonomi siswa, yaitu \$3,66 per makan gratis, \$3,26 untuk makanan bersubsidi, dan \$0,36 untuk makanan dengan harga penuh (Gundersen *et al.*, 2018). Program ini juga didukung oleh donasi komoditas federal, seperti buah-buahan dan biji-bijian, untuk membantu sekolah memenuhi standar gizi dengan anggaran yang terbatas (Ralston *et al.*, 2017). Pada tahun fiskal 2023, NSLP menyediakan 4,6 miliar makan siang dengan total biaya \$17,2 miliar, sedangkan SBP menyajikan 2,4 miliar sarapan dengan biaya \$5,2 miliar, menunjukkan penurunan 25,2% dan 8,8% dari tahun fiskal 2022 (Jones & Toossi, 2024).

Jepang

Obesitas anak di Jepang menjadi isu kesehatan penting, disebabkan oleh kebiasaan makan yang kurang tepat, seperti melewatkan sarapan, konsumsi lemak berlebihan, dan kurangnya sayuran serta buah. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Jepang menerapkan program makan siang di sekolah, menjadikannya negara pertama di Asia yang melaksanakan program ini untuk meningkatkan gizi anak-anak (Cheng *et al.*, 2018). Melalui konsep *Shokuiku* (pendidikan pangan dan gizi), Jepang menekankan pentingnya pendidikan gizi dalam kehidupan sehari-hari anak. Konsep ini mencakup kesadaran dan apresiasi terhadap makanan, pembentukan kebiasaan makan sehat, integrasi dalam kurikulum sekolah, penggunaan bahan lokal, serta pendekatan holistik terhadap gizi, yang diatur dalam *Basic Law on Shokuiku* (Food and Nutrition Education) tahun 2005.

Selain itu, *Kyūshoku* sebagai program makan siang di sekolah didasarkan pada *the School Lunch Act* (Gakkō Kyūshoku Hō) of 1954 dan direvisi pada 2008, menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di Jepang sejak akhir abad ke-19 (JapanGov, 2021). Pemerintah Jepang mengembangkan sistem pendidikan gizi yang komprehensif dengan melibatkan berbagai kementerian. Pendidikan pangan berbasis sekolah dimulai pada 1889 dan diperluas pada 1947. Pada 1954, *the School Lunch Act* diberlakukan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah, diikuti penerapan standar nutrisi pada 1970-an, dan pemberlakuan undang-undang mengenai *Shokuiku* pada 2005 untuk menekankan pendidikan pangan dan gizi (Tanaka & Miyoshi, 2012).

Revisi *School Lunch Act* pada 2008 mengarahkan fokus program pada *Shokuiku*, yaitu pendidikan yang menekankan penilaian bijak terhadap makanan, pemahaman budaya kuliner tradisional, serta penghargaan terhadap kehidupan dan alam melalui makanan, menjadikan makan siang sekolah sebagai langkah awal *Shokuiku* (Ishida, 2018). *Shokuiku* mencakup pengetahuan tentang pangan dan gizi, kebiasaan makan sehat, dan etika makan, yang terbukti efektif meningkatkan gizi dan kesehatan anak sekolah (Cheng *et al.*, 2018).

Program makan siang ini berlaku untuk seluruh siswa SD dan SMP, disubsidi oleh pemerintah sehingga siswa hanya membayar sekitar ¥250 per hari. Makanan disiapkan di sekolah menggunakan bahan bergizi sesuai standar ahli gizi, meliputi nasi, sayur, ikan, dan daging segar. Setiap makan siang menyediakan sekitar 600–700 kalori (Tim, 2024), dengan rincian kandungan gizi tercantum di Tabel 2.

Tabel 2

Kandungan Nilai Gizi Makan Siang Sekolah di Jepang, 2008

Kandungan Gizi				
	6–7 Tahun	8–9 Tahun	10–11 Tahun	12–14 Tahun
Energi (Kcal)	560	660	770	850
Protein (g)	16	20	25	28
Rata-rata protein ideal (g)	10–25	13–28	17–30	19–35
Lemak (%)	20–30% dari total energi			
Na (g)	< 2	< 2,5	< 3	< 3
Ca (mg)	300	350	400	420
Fe (mg)	3	3	4	4
Vitamin A (µgRE)	130	140	170	210
Vitamin B-1 (mg)	0,4	0,4	0,5	0,6
Vitamin B-2 (mg)	0,4	0,5	0,5	0,6
Vitamin C (mg)	20	23	26	33
Serat (g)	5,5	6	6,5	7,5

Sumber: Tanaka & Miyoshi, 2012

Berdasarkan *School Lunch Act* sejak 2009, makan siang sekolah berperan penting dalam mengembangkan pemahaman dan keterampilan mengenai penilaian makanan. Pemerintah Jepang mendorong setiap daerah untuk meningkatkan kualitas makanan, serta memastikan pencegahan keracunan makanan dan kecelakaan alergi secara menyeluruh. Untuk menindaklanjutinya, setiap daerah memperbaiki dan merenovasi dapur atau mengadopsi sistem memasak yang sesuai dengan standar pengendalian kebersihan dan pedoman penanganan alergi makanan.

Struktur organisasi program makan siang sekolah melibatkan kepala sekolah, ahli gizi, guru, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. Kepala sekolah bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan, serta mengawasi staf. Komite makan siang, komite perencanaan menu, dan komite pemilihan bahan memastikan menu memenuhi standar gizi dan kebersihan. Biaya operasional mencakup tenaga kerja, bahan makanan, peralatan, fasilitas, dan utilitas (Maruyama & Kurokawa, 2018).

Di Jepang, prinsip “pembayaran oleh penerima manfaat” diterapkan, di mana orang tua siswa hanya membayar biaya bahan makanan. Staf sekolah juga dapat memberikan kontribusi, sementara pemerintah pusat menanggung sebagian biaya. Pengeluaran publik, seperti biaya peralatan, tenaga kerja, dan utilitas, ditanggung oleh pemerintah pusat dan daerah, dengan pemerintah pusat lebih mengutamakan efisiensi finansial dalam pengeluarannya.

Brasil

Program makan siang gratis dimulai sekitar tahun 1955 untuk mengurangi kelaparan dan meningkatkan kehadiran siswa di sekolah. Pada 1979, program ini berganti nama menjadi *Programa Nacional de Alimentação Escolar* (PNAE), yang merupakan program pemberian makanan sekolah di Brasil. PNAE kini menjadi program makan bergizi terbesar kedua di dunia, melayani lebih dari 160.000 sekolah dengan lebih dari 50 juta siswa. Program ini direncanakan oleh 8.000 ahli gizi dan diawasi oleh 80.000 anggota dewan makanan sekolah. Tujuan utama PNAE adalah memastikan setiap anak menerima makanan yang memenuhi minimal 15% dari kebutuhan nutrisinya setiap hari. Rekomendasi terbaru menyarankan bahwa untuk anak sekolah setengah hari (4–5 jam), satu kali makan harus mencakup 20% dari kebutuhan nutrisi, atau 30% jika mereka makan dua kali dan anak yang bersekolah penuh hari harus menerima minimal 70% dari kebutuhan nutrisi harian mereka (Kitaoka, 2018).

PNAE diakui secara global karena keberhasilannya mengintegrasikan program makan sekolah dengan pertanian lokal. Program ini menggabungkan anggaran negara dengan produksi lokal untuk meningkatkan status gizi anak-anak sekaligus mendukung ekonomi lokal. Dengan memanfaatkan produk pertanian dari petani setempat, PNAE memperkuat kesejahteraan komunitas lokal (Sidaner *et al.*, 2013) dan memastikan anak-anak mendapatkan makanan sehat yang dihasilkan secara lokal (Pye-Smith, 2014).

PNAE tidak hanya membantu mengurangi kelaparan dan kekurangan gizi pada anak-anak, tetapi juga mengubah cara mereka memandang dan mengonsumsi makanan, serta mendukung pertanian lokal. Makanan yang disediakan harus mencakup minimal 30% bahan dari peternakan dan pertanian keluarga lokal di kota tempat sekolah berada. PNAE menekankan pentingnya makanan yang bervariasi dan bergizi, sambil mengurangi konsumsi produk olahan dan berkalori tinggi, seperti buah, sayuran, biji-bijian, dan protein tanpa lemak. Soda dan permen dilarang dalam menu (Revo, 2024). Kandungan nilai gizi untuk PNAE dapat dilihat di Tabel 3.

Tabel 3**Rekomendasi Kandungan Nilai Gizi Makan Siang Sekolah di Brasil**

	Energi (kkal)	Karbo (g)	Protein (g)	Lemak (g)	Serat (g)	Vit. A (g)	Vit. C (mg)	Ca (g)	Fe (g)	Mg (mg)	Seng (mg)
7–11 bulan											
20%	135	21,9	4,2	3,4	-	100	10	54	2,2	15	0,6
30%	200	32,5	6,3	5	-	150	15	81	3,3	23	0,9
70%	450	73,1	14	11,3	-	350	35	189	7,7	54	2,1
1–3 tahun											
20%	200	32,5	6,3	5	3,8	60	3	100	1,4	16	0,6
30%	300	48,8	9,4	7,5	5,7	90	5	150	2,1	24	0,9
70%	700	114,9	21,9	17,5	13,3	210	12	350	4,9	56	2,1
4–5 tahun											
20%	270	43,9	8,4	6,8	5	80	5	160	2	26	1
30%	400	65	12,5	10	7,5	120	8	240	3	39	1,5
70%	950	154,4	29,7	23,8	17,5	280	19	560	7	91	3,5
6–10 tahun											
20%	300	48,8	9,4	7,5	5,4	100	7	210	1,8	37	1,3
30%	450	73,1	14	11,3	8	150	11	315	2,7	56	2
70%	1.000	162,5	31,2	25	18,7	350	26	735	6,3	131	4,7
11–15 tahun											
20%	435	70,7	13,6	10,9	6,1	140	12	260	2,6	77	2
30%	650	105,6	20,3	16,3	9	210	18	390	3,2	95	2,7
70%	1.500	243,8	46,9	37,5	21,1	490	42	910	7,5	222	6,3

Sumber: Kitaoka, 2018

Komposisi menu harus sejalan dengan promosi kesehatan kebiasaan makan dan tetap memperhatikan preferensi makanan lokal. Selain itu, makanan sekolah harus mengandung minimal tiga porsi buah dan sayuran per minggu (200 gr/siswa/minggu).

PNAE merupakan kebijakan publik Brasil yang bertujuan mendukung pertumbuhan siswa, perkembangan biopsikososial, pembelajaran, prestasi akademik, dan membentuk kebiasaan makan sehat melalui pendidikan pangan dan gizi, serta menyediakan makanan yang memenuhi kebutuhan gizi siswa. Program ini menjadi

strategi penting dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memastikan hak setiap individu untuk mendapatkan gizi yang tepat. Pengelola sekolah bertanggung jawab mengawasi dan mengevaluasi berbagai kegiatan program kesehatan sekolah (*school health program/SHP*) guna memastikan keberhasilan layanan yang berkualitas bagi siswa, keluarga, dan masyarakat (Kitaoka, 2018).

SHP adalah kolaborasi antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan yang dirancang untuk menerapkan praktik terbaik di lingkungan sekolah. Hal ini mencakup penilaian kesehatan dan status gizi siswa, promosi kesehatan, serta pencegahan penyakit melalui kerja sama antara tenaga profesional di sekolah dan layanan kesehatan primer setempat. Sekolah diwajibkan untuk memantau dan mengevaluasi kesehatan siswa, mempromosikan pola makan sehat, serta memastikan keamanan pangan dan gizi. Pada tahun 2009, pemerintah menetapkan bahwa pendidikan pangan dan gizi harus terintegrasi penuh dalam kurikulum pendidikan dasar. Pada tahun 2012, Kementerian Pembangunan Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan meluncurkan kerangka acuan untuk pendidikan pangan dan gizi dalam kebijakan publik yang menargetkan taman kanak-kanak, sekolah dasar/menengah, dan universitas sebagai area penting untuk pendidikan pangan dan gizi.

PNAE didanai oleh pemerintah federal melalui dana nasional untuk pengembangan pendidikan (*fundo nacional de desenvolvimento da educação/FNDE*), yang mengharuskan setidaknya 30% anggarannya digunakan untuk membeli makanan dari usaha pertanian keluarga. Alokasi dana didasarkan pada data yang disediakan oleh Institut Nasional untuk Studi dan Penelitian Pendidikan melalui sensus tahunan sekolah. Informasi ini penting dalam menentukan jumlah siswa yang membutuhkan makanan di berbagai sekolah dan tingkat. PNAE juga melibatkan ahli gizi dari departemen pendidikan daerah yang mengunjungi sekolah-sekolah untuk membantu mengembangkan dan mengawasi kegiatan terkait, seperti perencanaan menu, pelatihan staf, dan pendidikan gizi. Di tingkat sekolah, PNAE dikombinasikan dengan program lain, seperti program akuisisi pangan, yang secara bertahap meningkatkan ketersediaan dan konsumsi buah serta sayuran.

C. EVALUASI KRITIS DAN ANALISIS PREDIKTIF

Evaluasi Kritis Program Makan Bergizi Sekolah

Evaluasi kritis terhadap praktik terbaik program makan bergizi di sekolah di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Brasil, sangat penting untuk memahami potensi penerapannya di Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari setiap pendekatan, serta memberikan wawasan tentang cara meningkatkan kesehatan siswa, mendukung pendidikan, dan mencapai tujuan keberlanjutan serta ketahanan pangan. Dengan menyoroti praktik terbaik dan landasan hukum yang kuat dari masing-masing negara, evaluasi ini memberikan pelajaran penting untuk pengembangan program serupa di Indonesia,

yang dapat digunakan untuk inovasi dan perbaikan di masa depan (Constantine & Santarelli, 2017; School Nutrition Association, 2024; Sidaner *et al.*, 2013).

Di Amerika Serikat, program makanan bergizi yang didanai pemerintah federal telah lama beroperasi dan menjadi salah satu yang terbesar di dunia. NSLP dan SBP terbukti efektif dalam mengatasi kelaparan dan memastikan akses ke makanan bergizi bagi jutaan siswa (School Nutrition Association, 2024). Kedua program ini diatur oleh pedoman gizi ketat dari USDA yang ditetapkan dalam *Healthy, Hunger-Free Kids Act* (2010), yang menetapkan standar nutrisi untuk biji-bijian, buah, sayuran, serta membatasi kalori, natrium, dan lemak. Tantangan yang dihadapi mencakup memastikan bahwa semua sekolah dapat memenuhi standar gizi yang ketat serta mengatasi masalah kelebihan asupan lemak dan garam (Asakura & Sasaki, 2017). Meskipun NSLP dan SBP efektif dalam menyediakan makanan bergizi, penerapan standar ini sering kali tidak merata, terutama di wilayah dengan sumber daya terbatas. Program ini juga sering dikritik karena inkonsistensi dalam kualitas nutrisi dan tingginya tingkat limbah makanan (Phillips, 2024; U.S. General Accounting Office, 1977). Ketergantungan pada dana federal membuat program ini rentan terhadap fluktuasi anggaran dan perubahan prioritas politik, yang berpotensi mengancam keberlanjutan jangka panjangnya (Gunderson, 1971). Jika menerapkan model NSLP dan SBP di Indonesia, penting untuk memastikan kualitas dan efisiensi program serta menangani limbah dengan baik. Pendekatan desentralisasi diperlukan untuk menyesuaikan dengan keberagaman geografis dan budaya, memastikan fleksibilitas penerapan standar gizi sesuai kondisi lokal. Dengan penyesuaian yang tepat dan kebijakan yang matang, Indonesia dapat memanfaatkan pengalaman Amerika Serikat untuk membangun program makanan sekolah yang mendukung kesehatan siswa dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. Fokus pada integrasi peningkatan gizi, pengurangan limbah makanan, dan pendidikan gizi akan menjadi sangat krusial, memerlukan koordinasi yang baik antarsektor terkait (Phillips, 2024; School Nutrition Association, 2024).

Sementara itu, Jepang berhasil mengintegrasikan pendidikan gizi dan pangan ke dalam kurikulum pendidikan melalui program *Shokuiku* dan *Kyūshoku*, yang berfokus pada asupan gizi seimbang, tanggung jawab, dan apresiasi terhadap makanan. Program ini telah terbukti efektif dalam menurunkan tingkat obesitas dan meningkatkan gizi siswa. Siswa terlibat aktif dalam penyajian dan pembersihan makanan, menggunakan bahan lokal dan musiman yang mendukung petani setempat serta melestarikan tradisi kuliner *Washoku* (Maruyama & Kurokawa, 2018; Rappleye *et al.*, 2024). Keberhasilan ini didukung oleh pendanaan pemerintah yang memastikan ketersediaan sumber daya pendidikan dan infrastruktur makanan yang memadai. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pendekatan Jepang dengan mengintegrasikan pendidikan gizi ke dalam kurikulum nasional dan menekankan penggunaan bahan makanan lokal. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran siswa akan kesehatan, kebersihan,

dan kerja tim, serta memperkaya pemahaman mereka tentang keragaman pangan di Indonesia. Namun, untuk memastikan keberhasilan program ini, diperlukan model pendanaan yang berkelanjutan, melibatkan dukungan pemerintah dan kontribusi masyarakat. Penyesuaian pendekatan terpusat seperti di Jepang perlu dilakukan agar sesuai dengan sistem desentralisasi di Indonesia, serta mengatasi tantangan disparitas ekonomi yang dapat menghambat partisipasi orang tua. Investasi dalam pelatihan guru dan peningkatan infrastruktur menjadi faktor penting untuk keberlanjutan dan efektivitas jangka panjang program ini.

Di Brasil, model PNAE berperan signifikan dalam mengurangi malnutrisi dengan mengintegrasikan pertanian lokal sebagai pemasok utama makanan sekolah. PNAE menetapkan bahwa minimal 30% bahan makanan harus berasal dari pertanian lokal, yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi, mendukung ekonomi lokal, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan (Sidaner *et al.*, 2013). Program ini tidak hanya menyediakan makanan bergizi bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah, tetapi juga memperluas akses ke makanan sehat untuk seluruh siswa, termasuk kelompok rentan. Meskipun diatur secara terpusat, PNAE memberikan fleksibilitas bagi daerah untuk menyesuaikan perencanaan makanan dan sumber pangan sesuai dengan kebiasaan diet lokal serta ketersediaan produk setempat. Namun, tantangan utama terletak pada distribusi dan pengawasan di wilayah terpencil yang memerlukan infrastruktur yang andal untuk memastikan konsistensi kualitas dan gizi makanan (Constantine & Santarelli, 2017; Kitaoka, 2018). Model PNAE menunjukkan pentingnya integrasi petani lokal ke dalam rantai pasokan makanan sekolah, yang sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia.

Analisis Prediktif Program Makan Bergizi Sekolah

Hasil evaluasi terhadap program makan bergizi di Jepang, Amerika Serikat, dan Brasil memberikan wawasan berharga mengenai potensi penerapan, dampak, dan tantangan yang mungkin dihadapi jika kebijakan serupa diterapkan di Indonesia. Amerika Serikat menawarkan model besar melalui NSLP dan SBP, yang didukung oleh pendanaan federal dan standar gizi ketat. Model ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia tentang mekanisme pendanaan yang memastikan keberlanjutan program, aksesibilitas makanan sehat di sekolah, penciptaan akses universal untuk mengatasi kerawanan pangan, serta menangani tantangan disparitas regional dalam kualitas makanan dan pengurangan limbah.

Sementara itu, Jepang berhasil mengintegrasikan pendidikan gizi dan pangan ke dalam kurikulum pendidikan melalui program *Shokuiku* dan *Kyūshoku* untuk menanamkan kebiasaan makan sehat dan melestarikan tradisi budaya. Pendekatan ini dapat diadaptasi oleh Indonesia dengan memasukkan pendidikan gizi dalam kurikulum nasional, serta pengenalan makanan lokal dan penekanan pada diet seimbang yang disesuaikan dengan keragaman budaya yang ada.

Di sisi lain, Brasil menekankan praktik berkelanjutan dengan sistem desentralisasi dan integrasi pertanian lokal. Model ini memberikan peluang untuk memperkuat pertanian, ketahanan pangan, dan perekonomian, serta mengurangi ketergantungan pada makanan olahan, meskipun hal ini memerlukan investasi dalam infrastruktur logistik yang memadai untuk distribusi yang efisien, terutama di daerah terpencil.

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan, dapat dilihat perbandingan program makan di sekolah di Amerika, Jepang, dan Brasil di Tabel 4.

Tabel 4
Perbandingan Program Makan di Sekolah

Negara	Jumlah Penerima Manfaat	Biaya per Anak per Hari	Total Anggaran per Tahun	Proporsi Kebutuhan Gizi	Sumber Bahan
Indonesia (Rencana)	80 juta	Rp15.000	Rp400 triliun	100% (rencana)	Belum spesifik (rencana)
Amerika Serikat (NSLP)	30,4 juta	\$3,66	\$13,9 miliar (NSLP) & \$4,5 miliar (SBP)	1/3–1/2 kebutuhan gizi harian	Donasi komoditas federal dan pembelian
Jepang (Kyūshoku)	Tidak spesifik (semua siswa sekolah dasar dan menengah)	¥250 (Rp36.000)	¥50.000 per anak (Rp7,2 juta)	600–850 kalori per porsi	Produk lokal
Brasil (PNAE)	50 juta	Bervariasi (pembelian bahan lokal)	Bergantung pada alokasi FNDE	20%–70% kebutuhan gizi harian	30% dari pertanian keluarga lokal

Sumber: Asakura & Sasaki, 2017; Bartfeld & Ahn, 2011; Constantine & Santarelli, 2017; Food and Nutrition Service, 2021; Jones & Toossi, 2024; MEXT, 2013; Pye-Smith, 2014; Sirait, 2024; Tanaka & Miyoshi, 2012.

Jika Indonesia ingin mengimplementasikan program makan bergizi gratis dengan pendekatan ketiga negara tersebut, negara perlu mengembangkan infrastruktur, memastikan pendidikan gizi yang efektif, dan meningkatkan keterlibatan komunitas. Dengan estimasi anggaran yang dapat mencapai Rp400 triliun per tahun, pemerintah harus menemukan solusi pembiayaan yang efisien dengan mempertimbangkan kolaborasi antara pemerintah pusat, sektor swasta, dan komunitas lokal.

Estimasi anggaran untuk program makan bergizi gratis di Indonesia bervariasi. Berdasarkan kajian Sirait (2024), jika program makan bergizi gratis berjalan selama 226 hari/tahun untuk 80 juta penerima manfaat, maka total estimasi anggaran terendah bisa mencapai Rp26,35 triliun, dan yang tertinggi bisa mencapai Rp222,35 triliun, tergantung pada jumlah penerima manfaat (Sirait, 2024a, p. 5). Jika program tidak disertai efisiensi belanja lainnya, implementasi program diprediksi dapat memperlebar defisit anggaran hingga Rp619,89 triliun, dengan rasio defisit anggaran terhadap PDB mencapai 2,55%-2,68% (Sirait, 2024b, p. 8).

Melalui kolaborasi yang solid antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal, serta komitmen berkelanjutan untuk inovasi dan evaluasi efektivitas, Indonesia

dapat mengadaptasi elemen dari ketiga model tersebut untuk menciptakan program peningkatan status gizi anak di sekolah, pembangunan berkelanjutan, dan kedaulatan pangan nasional. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan lokal dan kondisi spesifik di Indonesia, serta menggabungkan pendekatan yang telah terbukti efektif di tingkat internasional.

D. TRANSPLANTASI HUKUM DAN OPSI MODEL KEBIJAKAN

Transplantasi Hukum

Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah dan mendukung pembangunan berkelanjutan dengan mengadopsi praktik terbaik dari program makanan bergizi sekolah di Jepang, Amerika Serikat, dan Brasil. Pembelajaran dari praktik ini dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional melalui proses transplantasi hukum.

Sebagai contoh, model NSLP dan SBP di Amerika Serikat menunjukkan bagaimana dukungan federal dan standar gizi yang ketat dapat memperluas akses ke makanan bergizi. Indonesia bisa mengembangkan undang-undang yang mengatur makanan sekolah dengan menetapkan kriteria kelayakan untuk makanan gratis atau bersubsidi, serta membangun mekanisme pendanaan yang efektif melalui pemerintah pusat. Kementerian Kesehatan dapat menetapkan standar nutrisi yang ketat, memastikan makanan yang disajikan mengandung vitamin, mineral, protein, dan lemak sehat yang sesuai dengan kebutuhan gizi lokal (Sidaner *et al.*, 2013).

Di Jepang, integrasi pendidikan gizi ke dalam kurikulum sekolah melalui *Shokuiku* dan *Kyūshoku* berhasil mengajarkan pentingnya diet seimbang dan kebiasaan makan sehat. Indonesia dapat mengadaptasi pendekatan ini dengan memasukkan pendidikan gizi dalam kurikulum nasional, menekankan makanan lokal dan tradisional, serta mendorong gaya hidup sehat. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dapat berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian untuk menciptakan kebijakan pendidikan gizi dan pangan nasional yang aplikatif (Constantine & Santarelli, 2017).

Sementara itu, model PNAE di Brasil yang berhasil mengintegrasikan produksi lokal ke dalam penyediaan makanan sekolah dapat membantu Indonesia mendukung petani lokal dan memastikan ketersediaan makanan yang bergizi. Dengan mengesahkan undang-undang yang mewajibkan sekolah untuk memperoleh pasokan makanan dari petani lokal, Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan dan ketahanan pangan. Pendekatan terdesentralisasi akan memungkinkan provinsi atau kabupaten untuk menyesuaikan menu makanan sesuai dengan kebiasaan lokal, sambil mematuhi standar gizi nasional (Sidaner *et al.*, 2013).

Ketiga pelajaran ini menunjukkan bahwa dengan mengintegrasikan elemen-elemen dari model NSLP, SBP, dan PNAE, Indonesia dapat mengembangkan program makanan sekolah yang tidak hanya meningkatkan status gizi anak-anak tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi lokal dan keberlanjutan lingkungan. Keberhasilan

implementasi ini akan bergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan lokal dan kondisi spesifik di Indonesia, serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal. Transplantasi hukum yang efektif akan memerlukan penyesuaian regulasi yang sesuai dengan konteks lokal untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program (Constantine & Santarelli, 2017; School Nutrition Association, 2024; Sidaner *et al.*, 2013).

Dalam mengadopsi praktik terbaik dari program makanan sekolah yang berhasil di Amerika Serikat, Jepang, dan Brasil, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk merancang strategi implementasi yang komprehensif dan sesuai dengan konteks lokal. Strategi ini bertujuan untuk mengintegrasikan elemen kunci dari model internasional sambil memperkuat kerangka hukum dan regulasi. Pendekatan ini mendukung pelaksanaan yang berkelanjutan dan efisien, serta menjamin inklusivitas dan keadilan dalam distribusi serta akses ke program makanan sekolah.

a. Penyusunan Kerangka Hukum dan Kebijakan

Penyusunan kerangka hukum dan kebijakan yang komprehensif penting untuk menerapkan program makan bergizi di sekolah. Kerangka ini perlu mencakup standar gizi, pendanaan, dan keterlibatan komunitas. Indonesia dapat terinspirasi dari pendekatan *Shokuiku* di Jepang dengan memperluas undang-undang pendidikan nasional untuk memasukkan pendidikan gizi ke dalam kurikulum.

Mengacu pada program NSLP dan SBP di Amerika Serikat, Kementerian Kesehatan dapat menetapkan standar gizi untuk makanan sekolah, termasuk aturan kandungan makronutrien dan mikronutrien. Pemerintah Indonesia juga bisa mengalokasikan dana dari anggaran pusat untuk mendukung program ini, termasuk subsidi bagi sekolah yang melayani komunitas berpenghasilan rendah.

Pendekatan desentralisasi, seperti model PNAE di Brasil, memungkinkan daerah menyesuaikan program dengan kebutuhan dan preferensi makanan lokal. Kebijakan ini mendorong pembelian bahan dari petani lokal, mendukung ekonomi pedesaan, dan ketahanan pangan. Kerja sama dengan koperasi pertanian menjamin pasokan berkualitas, sementara kemitraan sektor swasta melalui *corporate social responsibility* (CSR) dapat meningkatkan efisiensi distribusi dan penyimpanan makanan.

b. Peningkatan Kapasitas dan Edukasi

Peningkatan kapasitas dan edukasi bagi semua pemangku kepentingan sangat penting untuk kesuksesan program. Pelatihan bagi tenaga pendidik, staf sekolah, dan komunitas lokal harus diadakan agar pemangku kepentingan dapat mengimplementasikan program dengan efektif dan memahami pentingnya gizi bagi perkembangan anak. Program pelatihan harus mencakup penerapan praktik gizi yang baik serta teknik pertanian yang berkelanjutan. Selain itu, investasi dalam infrastruktur, seperti sistem distribusi yang efisien dan fasilitas penyimpanan yang

memadai, sangat penting untuk keberhasilan program, memastikan kelancaran operasional, mendukung logistik, dan menjamin akses yang baik terhadap sumber makanan bergizi. Selain itu, partisipasi komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program makanan sekolah juga berperan penting dalam kesuksesan edukasi gizi.

c. Monitoring, Evaluasi, dan Penyesuaian Berkelanjutan

Sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan sangat penting untuk memastikan program makan bergizi di sekolah berjalan efektif dan mencapai tujuannya. Pemantauan bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam implementasi program, sedangkan evaluasi rutin mengukur dampak program dan menyesuainya dengan kebutuhan lokal. Sistem ini akan menilai hasil nutrisi, kepuasan pengguna, dan dampak ekonomi pada komunitas secara berkala. Keterlibatan komunitas juga krusial karena masukannya dapat membantu untuk penyesuaian berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, program akan disesuaikan untuk memenuhi standar gizi yang ditetapkan dan mengatasi tantangan implementasi yang muncul.

Opsi Rekomendasi Model Kebijakan

Dalam merancang kebijakan untuk menerapkan program makan bergizi di sekolah, Indonesia memiliki peluang untuk belajar dari praktik terbaik yang diterapkan di Jepang, Amerika Serikat, dan Brasil. Ketiga negara ini memberikan wawasan berharga tentang cara menyusun, mendanai, dan mempertahankan program nutrisi sekolah yang efektif. Ada beberapa opsi kebijakan dari praktik terbaik di negara-negara tersebut yang dapat diadaptasi dan diterapkan di Indonesia.

a. Integrasi Pendidikan Gizi

Shokuiku di Jepang telah berhasil mengintegrasikan pendidikan gizi yang komprehensif ke dalam kurikulum sekolah, mengajarkan siswa tentang nutrisi, kebiasaan makan sehat, budaya makanan, dan keberlanjutan. *Kyūshoku* menyediakan makan siang seimbang yang terbuat dari bahan-bahan musiman yang bersumber secara lokal, dan mencerminkan keberagaman warisan kuliner.

Untuk mengimplementasikan program serupa, Indonesia perlu mengubah kurikulum pendidikan nasional dengan mengintegrasikan pendidikan gizi sejak usia dini. Ini mencakup pelajaran tentang asal makanan, diet seimbang, dan kelestarian lingkungan. Partisipasi siswa dalam persiapan, penyajian, dan pembersihan makanan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan apresiasi terhadap makanan.

Kolaborasi antara kementerian-kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendidikan, kesehatan, dan pertanian sangat penting untuk mendukung penerapan pendidikan gizi dan pengadaan sumber makanan lokal. Pendekatan

ini akan meningkatkan kesehatan jangka panjang, melestarikan budaya lokal, dan mempromosikan keberlanjutan dengan memanfaatkan bahan-bahan musiman. Namun, tantangan seperti infrastruktur dan sumber daya perlu diatasi melalui investasi signifikan dalam pembangunan infrastruktur sekolah, pelatihan guru, dan pengembangan rantai pasokan pertanian.

b. Program Makanan Bergizi Gratis Skala Nasional

Program makanan bergizi gratis di Indonesia dapat mengadopsi model NSLP dan SBP di Amerika Serikat, untuk memastikan siswa di seluruh Indonesia menerima makanan bergizi secara gratis atau dengan harga yang terjangkau. Untuk mencapai tujuan ini, pedoman nutrisi yang ketat perlu dikembangkan untuk memastikan jumlah sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan protein yang disajikan sesuai dengan kebutuhan gizi siswa.

Melalui undang-undang yang mengatur makanan sekolah, pemerintah dapat menetapkan kerangka kerja untuk program ini, termasuk kriteria kelayakan bagi siswa yang menerima makanan gratis atau bersubsidi, dan menjamin pendanaan yang konsisten dari pemerintah pusat. Dengan menyediakan setidaknya satu makanan bergizi per hari, program ini dapat mengatasi kerawanan pangan di kalangan siswa berpenghasilan rendah dan meningkatkan hasil pendidikan secara keseluruhan. Namun, tantangan terkait biaya dan skalabilitas perlu dihadapi dengan alokasi anggaran yang substansial serta infrastruktur pemerintah yang kuat, terutama di daerah terpencil.

c. Program Makanan Sekolah Terdesentralisasi dengan Integrasi Pertanian Lokal

Opsi ini mewajibkan sekolah untuk mendapatkan sebagian makanannya dari petani lokal, sehingga dapat mempromosikan pembangunan pedesaan dan pertanian berkelanjutan. Meskipun diatur secara nasional, pemerintah daerah dan sekolah diberikan fleksibilitas untuk merancang menu sesuai dengan ketersediaan dan preferensi lokal. Dengan mengadopsi pendekatan seperti di Brasil, 30% makanan berasal dari petani lokal, program ini akan membantu mendukung ekonomi lokal dan memastikan pasokan bahan makanan yang segar.

Menu yang terdesentralisasi memungkinkan penyesuaian dengan budaya makanan lokal dan pemanfaatan bahan musiman. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pertanian perlu memfasilitasi kemitraan antara sekolah dan petani lokal untuk menjamin ketersediaan bahan segar, sementara ahli gizi lokal memastikan bahwa makanan memenuhi standar gizi nasional. Namun, tantangan logistik dalam memastikan pasokan makanan segar yang konsisten di daerah terpencil perlu diatasi melalui perbaikan infrastruktur dan pengembangan sistem distribusi yang efisien.

d. Model Hibrida dengan Pendekatan Terintegrasi

Model hibrida yang menggabungkan elemen-elemen dari ketiga negara dapat menjadi solusi komprehensif bagi Indonesia. Pendekatan ini mencakup integrasi pendidikan gizi dari Jepang, program makanan berskala besar dari Amerika Serikat, dan penggunaan sumber pangan lokal dari Brasil untuk menciptakan efisiensi program yang berkelanjutan (Cruz, 2020; FAO, 2019). Untuk mengimplementasikan model ini, undang-undang yang mengatur makanan sekolah dan pendidikan gizi harus disahkan agar semua elemen dapat terintegrasi dengan baik.

Kolaborasi antarkementerian akan menjadi kunci untuk memastikan implementasi yang efektif, dengan masing-masing kementerian mengawasi aspek-aspek spesifik tertentu dari program tersebut. Model ini diharapkan dapat mengatasi berbagai isu terkait gizi anak, kesehatan, dan keberlanjutan. Namun, tantangan koordinasi antar-lembaga dan kebutuhan investasi yang signifikan untuk infrastruktur akan menjadi hambatan yang perlu diatasi dalam pelaksanaan model hibrida ini.

Setiap opsi kebijakan tersebut menawarkan keuntungan dan tantangan berdasarkan praktik terbaik dari Jepang, Amerika Serikat, dan Brasil. Model hibrida yang menggabungkan pendidikan gizi, pendanaan federal, dan sumber pangan lokal dapat menjadi solusi paling komprehensif bagi Indonesia. Keberhasilan implementasi kebijakan ini akan memerlukan adaptasi yang cermat terhadap konteks budaya dan geografis Indonesia yang beragam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program ini inklusif, berkelanjutan, dan dapat diakses oleh semua wilayah.

E. PENUTUP

Program makan bergizi di sekolah berperan penting dalam mendukung kesehatan dan pendidikan anak-anak di Indonesia. Dengan mengadopsi praktik terbaik dari Amerika Serikat, Brasil, dan Jepang, Indonesia dapat mengembangkan strategi implementasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Strategi ini akan menggabungkan standar gizi ketat dari Amerika Serikat, dukungan pertanian lokal dari Brasil, dan pendidikan gizi dari Jepang. Indonesia berpeluang dapat meningkatkan kualitas nutrisi anak-anak sekolah melalui pengembangan kerangka hukum dan kebijakan yang kuat, serta pengaturan pendanaan dan manajemen sumber daya yang efektif.

Adopsi elemen-elemen relevan dari ketiga negara tersebut diharapkan dapat mendukung kesuksesan implementasi program makan bergizi gratis. Pendekatan yang terintegrasi, yang melibatkan komunitas dan fokus pada pendidikan gizi, dapat secara signifikan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, program makan bergizi di sekolah menjadi langkah penting dalam meningkatkan prestasi dan kesejahteraan siswa di seluruh negeri.

Studi ini menunjukkan bahwa penggabungan kebijakan yang mendukung gizi, pendidikan, dan ekonomi lokal merupakan kunci dalam mengimplementasikan program makan bergizi di sekolah. Pengalaman dari ketiga negara tersebut menawarkan

wawasan berharga dalam merancang program yang efisien dan berdampak jangka panjang pada masyarakat.

Dengan demikian, DPR RI harus mengambil langkah legislatif untuk menetapkan dan mendukung program makanan bergizi di sekolah yang komprehensif. Ini mencakup perumusan undang-undang yang spesifik, penjaminan pendanaan yang berkelanjutan, dan pembangunan kerja sama yang luas antara sektor publik dan swasta. Dengan langkah-langkah ini, semua anak Indonesia akan mendapatkan akses ke makanan bergizi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara holistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asakura, K., & Sasaki, S. (2017). School lunches in Japan: Their contribution to healthier nutrient intake among elementary-school and junior high-school children. *Public Health Nutrition*, 20(9), 1523–1533. <https://doi.org/10.1017/S1368980017000374>
- Bartfeld, J., & Ahn, H. M. (2011). The school breakfast program strengthens household food security among low-income households with elementary school children. *Journal of Nutrition*, 141(3), 470–475.
- Baskin, G. (2024). *Food for thought: What the United States can learn from Japan's school lunch system*. USJETAA. <https://www.usjetaa.org/news/jets-on-japan-food-for-thoughtwhat-the-united-states-can-learn-from-japans-school-lunch-system>
- Berkowitz, D., Pistor, K., & Richard, J. (2003). Economic development, legality, and the transplantation of law. *Journal of Comparative Economics*, 31(1), 70–89.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2023). *Healthy eating learning opportunities and nutrition education*. CDC. https://www.cdc.gov/healthyschools/nutrition/school_nutrition_education.htm
- Cheng, G., Yang, F., Xiong, F., Zhao, L., Zhang, L., & Wang, Y. (2020). Comparison of nutrition education policies and programs for children in China and other selected developed countries. *Global Health Journal*, 4, 72–78. doi: 10.1016/j.glohj.2020.08.002
- Constantine, J., & Santarelli. (2017). Tackling hunger through sustainable food policies – learning from Brazil's Policies to guarantee food rights. *International Learning Series/5: Brazil's Policies to Guarantee Food Rights*. July. The Food Foundation & Institute of Development Studies.
- Cruz, L. (2020). *Legal guide on school food and nutrition - Legislating for a healthy school food environment*. FAO Legal Guide No. 2. Rome, FAO. <https://doi.org/10.4060/ca9730en>
- Drake, L., Woolnough, A., Burbano, & C., Bundy, D. (2016). *Global school feeding sourcebook: Lessons from 14 countries*. Imperial College Press.
- FAO. (2019). *Nutrition guidelines and standards for school meals: A report from 33 low and middle-income countries*. FAO. <https://openknowledge.fao.org/server/api/>

- core/bitstreams/d3b90456-169c-4bca-a5a8-69c4fc3a4e9e/content
- FAO. (2020). *Legislating for adequate food and nutrition in schools*. FAO. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0b3fb7e7-9999-47c6-8faa-44394d57213a/content>
- Food and Nutrition Service. (2021). *National school lunch program: Participation and funding*. U.S. Department of Agriculture.
- Food and Nutrition Service. (2024). *National school lunch program*. U.S. Department of Agriculture.
- Gaddis, J. E., & Robert, S. A. (Eds.). (2024). *Transforming school food politics around the world*. The MIT Press.
- GCNF. (2021). *Federative Republic of Brazil: School meal programs*. U.S. Department of Agriculture.
- Gundersen, C., Kreider, B., & Pepper, J. V. (2018). Partial identification methods for evaluating food assistance programs: A case study of the school breakfast program. *Journal of the American Statistical Association*, 113(523), 1076–1089.
- Gunderson, G. W. (1971). *The national school lunch program: Background and Development*. U.S. Department of Agriculture, Food and Nutrition Service.
- Guthrie, J. (2021, Mei 3). *USDA school meals support food security and good nutrition*. Ers.usda.gov. <https://www.ers.usda.gov/amber-waves/2021/may/usda-school-meals-support-food-security-and-good-nutrition/>
- Husa, J. (2018). Developing legal system, legal transplants, and path dependence: Reflections on the rule of law. *The Chinese Journal of Comparative Law*, 6(2), 129–150. <https://doi.org/10.1093/cjcl/cxy008>
- IPU, & FAO. (2021). *Food systems and nutrition – Handbook for parliamentarians N° 32*. IPU. <https://doi.org/10.4060/cb2005en>
- Ishida, H. (2018). The history, current status, and future directions of the school lunch program in Japan. *The Japanese Journal of Nutrition and Dietetics*, 76(Supplement 1), S2–S11.
- Izumi, B., Bersamin, A., Shanks, B. C., Sweeney, G. G., & Murimi, M. (2018). The US national school lunch program: A brief overview. *Jpn J. Nutr. Diet*, 76(1), 126–132. <https://doi.org/10.5264/eiyogakuzashi.76.S126>
- JapanGov. (2021). *School lunches: The key to children's health and prosperity*. The Government of Japan. https://www.japan.go.jp/kizuna/2021/11/school_lunches.html
- Jones, J. W., & Toossi, S. (2024). *The food and nutrition assistance landscape: Fiscal year 2023 annual report* (Report No. EIB-274). U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service. <https://doi.org/10.32747/2024.8453401.ers>
- Kitaoka, K. (2018). The national school meal program in Brazil: A literature review. *Jpn. J. Nutr. Diet*, 76 (1), 115–125. <https://doi.org/10.5264/eiyogakuzashi.76.S115>
- Maruyama, S., & Kurokawa, A. (2018). The operation of school lunches in Japan: Construction of a system considering sustainability. Review Article, *The Japanese*

- Journal of Nutrition and Dietetics*, 76(1), 12–22.
- MEXT. (2013, Maret). *School lunch program in Japan*. National Institute for Educational Policy Research. <https://www.nier.go.jp/English/educationjapan/pdf/201303SLP.pdf>
- Michaels, R. (2022). Legal transplantation and the role of social media in legal diffusion. *Law and Social Inquiry*, 47(3), 572–598.
- Phillips, J. (2024). *A comparative analysis of Japan and the United States school lunch programs*. Ouachita Baptist University Scholarly Commons. https://scholarlycommons.obu.edu/honors_theses
- Pye-Smith, C. (2014). *Scaling up the Brazilian school feeding model: Using south-south cooperation to share Brazil's experience of school feeding in Latin America and the Caribbean*. FAO.
- Ralston, K., Newman, C., Clauson, A., Guthrie, J., & Buzby, J. C. (2017). *The national school lunch program: Background, trends, and issues*. U.S. Department of Agriculture.
- Rapplee, J., Komatsu, H., & Nishiyama, S. (2024). School food, sustainability, and interdependence: Learning from Japan's Shokuiku? *Oxford Review of Education*, 1–19. <https://doi.org/10.1080/03054985.2023.2296097>
- Revo M. (2024, Februari 29). Makan gratis Brasil: Anak stunting turun, serap ribuan tenaga kerja. *CNBCIndonesia.com*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240229051607-128-518457/makan-gratis-di-brasil-anak-stunting-turun-serap-ribuan-tenaga-kerja>
- Santos, E. B., Maynard, D. C., Zandonadi, E. P., Raposo, A., & Botelho, R. B. A., (2022). Sustainability recommendations and practices in school feeding: A systematic review. *Foods*, 11(2). <https://doi.org/10.3390/foods11020176>
- School Nutrition Association. (2024). Federal legislation & regulations. School Nutrition. <https://schoolnutrition.org/advocacy/federal-legislation-regulations/>
- Sidaner, E., Balaban, D., & Burlandy, L. (2013). The Brazilian school feeding programme: An example of an integrated programme in support of food and nutrition security. *Public Health Nutrition*, 16(6), 989–994. <https://doi.org/10.1017/S1368980012005101>
- Sirait, R. A. (2024a). *Program makan siang bergizi gratis, risikonya terhadap APBN dan indikator perekonomian [Analisis]*. Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara.
- Sirait, R. A. (2024b). *Rencana program makan siang dan susu gratis dalam RAPBN 2025 [Makalah]*. Disusun dalam rangka uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan analis APBN dari Analis APBN Ahli Muda menjadi Analis APBN Ahli Madya.
- Sullivan, J. (2005). Transplanting law: An overview of the comparative law methodology. *Journal of Legal Education*, 55(1), 8–20.
- Tanaka, N., & Miyoshi, M. (2012). School lunch program for health promotion among children in Japan. *Asia Pac J Clin Nutr*, 21(1), 155–158.
- Tim. (2024, Februari 22). Program makan siang di Jepang, menu

- sehat sesuai standar ahli gizi. *CNNIndonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240222100732-262-1065840/program-makan-siang-di-jepang-menu-sehat-sesuai-standar-ahli-gizi>.
- U.S Department of Agriculture. (2010). *U.S. Department of Health dan Human Services: Dietary guideline for Americans* (7th ed.) U.S Government Printing Office.
- U.S. General Accounting Office. (1977). *The national school lunch program: Is it working?* (GAO/HRD-77-89). U.S. Government Printing Office. <https://www.gao.gov/assets/094675.pdf>
- Watson, A. (1974). *Legal transplants: An approach to comparative law*. Scottish Academic Press.
- WFP. (2023). *State of school feeding worldwide 2022*. WFP.org. docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000147725/download/?_ga=2.138936117.745885397.1727533209-291666611.1727533209
- World Health Organization. (2020). *Malnutrition*. WHO. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition>
- Zulfikar, F. (2024, Juli 25). 8 Negara ini punya program makan siang sekolah gratis, Indonesia menyusul. *Detik.com*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7455500/8-negara-ini-punya-program-makan-siang-sekolah-gratis-indonesia-menyusul>